

KETERKAITAN ANTAR SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI INDONESIA (Klasifikasi 14 Propinsi Berdasarkan Tabel IO Propinsi Tahun 2000)

Dyah Hapsari Amalina S.¹ dan Alla Asmara²

¹ Alumni Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

² Dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

ABSTRACT

Only several studies have been conducted to determine how cross-sector linkages occur. The objectives of this study are : (1) to analyze the linkages between the manufacturing sector with the agricultural sector in the regional economy, and (2) to analyze the linkages between the manufacturing with trade, hotels and restaurants sector in the regional economy. Input-output analysis (IO) were used to find out the linkages between economic sectors. The study result shows that Lampung, South Sulawesi, South Kalimantan and North Sumatra have a strong total backward linkages and forward linkages between the manufacturing with agricultural sectors. While North Maluku, NTT, West Kalimantan, West Java, East Java and Banten are the otherwise. The results of linkage analysis between the manufacturing with trade, hotels, restaurants sector shows that there is no province in the study who had strong total backward linkages and forward linkages. Provinces which has a weak total backward linkages and forward linkages between the manufacturing with trade, hotels, restaurants sector are Lampung, Gorontalo, South Kalimantan and West Java.

Keywords : Linkage between sector, Province, Input-Output Analysis

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Perubahan perekonomian suatu negara sering dipahami atau diartikan sebagai proses transformasi struktural. Seperti istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi struktural, dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi *agregat demand*, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), *agregat supply* (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery dalam Hill, 2003). Perubahan struktural dalam ekonomi modern mencakup perubahan kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan perubahan dari perusahaan perseorangan menjadi

perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh (Jhingan, 2004).

Konsep tersebut menjelaskan mengapa sebagian besar negara berkembang di dunia beranggapan bahwa transformasi struktural begitu penting dalam perkembangan ekonomi mereka seperti halnya yang terjadi di negara maju. Pandangan bahwa negara-negara maju yang pendapatannya tinggi memiliki sektor industri yang sangat besar membuat industrialisasi dipilih sebagai jalan ke arah perkembangan ekonomi yang lebih maju. Dengan pemahaman demikian, pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia terus berupaya memajukan sektor industri.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perubahan struktural bukanlah hal yang mudah karena mayoritas provinsi di Indonesia merupakan provinsi yang didominasi oleh pertanian. Menurut Jhingan (2004), perubahan struktural menyangkut ekspansi secara besar-

besaran sektor-sektor nonpertanian sedemikian rupa sehingga sektor pertanian pasti semakin menciut. Ini berarti mengurangi kontribusi sektor pertanian dalam PDB tanpa menyebabkan penurunan *output* dari sektor tersebut.

Pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke industri. Hal ini dapat dibuktikan oleh indikator ekonomi yang memperlihatkan semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian dalam PDB. Kontribusi sektor ini dalam PDB tahun 1967 adalah sebesar 67 persen, dan menurun menjadi hanya 17,2 persen di tahun 1995 (BPS, 1996). Sedangkan dalam periode yang sama, sektor industri meningkatkan kontribusinya dari 5 persen menjadi 24,3 persen. Pada tahun 2006, industri pengolahan juga menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB (BPS, 2007). Namun demikian, pada pangsa tenaga kerja terjadi hal yang sebaliknya. Kontribusi sektor pertanian yang semakin kecil tidak diikuti dengan menurunnya pangsa tenaga kerja di sektor ini. Bahkan pada tahun 2006 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih sebesar 42,3 juta orang (Bapenas, 2006). Jumlah ini sama dengan 44,5 persen dari total tenaga kerja nasional.

Permasalahan yang terjadi dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan sektor industri menunjukkan adanya masalah dalam perubahan struktural perekonomian nasional. Kontribusi sektor industri terus meningkat, sayangnya justru sektor pertanianlah yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Kemiskinan pekerja bidang pertanian semakin parah, demikian juga kesenjangan antara sektor pertanian dan sektor industri yang semakin luas. Kondisi ini akan mempersulit pembangunan pedesaan, karena mayoritas pekerja pertanian dan

keluarganya tinggal di pedesaan. Cepatnya penurunan pangsa pertanian terhadap PDB dibandingkan dengan penurunannya terhadap pangsa tenaga kerja, dapat menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terperangkap di bidang pertanian sehingga semakin tidak produktif dan tidak efisien, yang menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita tenaga kerja sektor pertanian (Nainggolan, 2007). Ketidakseimbangan transformasi struktural perekonomian ini dengan demikian menghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pada gilirannya menjadi kendala pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh kontribusi *output* seluruh sektor dalam perekonomian.

Lains (1989) dan Simatupang (1997) dalam Suryana *et al* (1998) mengemukakan bahwa keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Selama periode tahun 1971 sampai 1990, derajat keterkaitan produk antar industri dalam sektor pertanian mengalami penurunan tajam sehingga pada tahun 1979, indeks total kaitan ke belakang maupun ke depan kurang dari satu untuk seluruh subsektor dalam lingkup pertanian (Suryana *et al*, 1998). Analisis Tabel *Input-Output* Indonesia tahun 1995 dan 2006 menunjukkan bahwa sebagian besar agroindustri mempunyai keterkaitan ke belakang yang tinggi namun keterkaitan ke depan rendah (Rosa, 2006).

Perkembangan ekonomi ke arah yang lebih maju melalui industrialisasi dapat meningkatkan keterkaitan antar sektor. Dengan adanya industrialisasi akan muncul dan berkembang kegiatan lain yang menjadi komponen pendukung industri tersebut. Perkembangan industri berbasis pertanian misalnya, akan mendorong permintaan produk

pertanian sehingga meningkatkan keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian. Selain itu dukungan sektor lain juga akan meningkat seperti sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa-jasa lainnya.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan keterkaitan antar sektor di Indonesia. Berkenaan dengan uraian latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan, makalah ini akan membahas keterkaitan antar sektor yang terjadi. Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian dan keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam perekonomian daerah.

2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk : (1) Menganalisis keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian dalam perekonomian daerah, (2) Menganalisis keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian mencakup 14 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Data keterkaitan antar sektor diperoleh dari hasil analisis Tabel I-O provinsi tahun 2000 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Untuk kebutuhan penelitian ini maka Tabel I-O tersebut diagregasi menjadi sembilan sektor. Tabel I-O

yang digunakan merupakan tabel transaksi total atas dasar harga produsen.

1. METODE ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA

Metode kuantitatif merupakan metode yang dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui keterkaitan antar sektor dalam perekonomian dilakukan analisis Tabel I-O yang diolah dengan program aplikasi *input output* yang dikembangkan oleh Pusat Studi Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, dimana program ini merupakan program berbasis *excel*.

2. ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SEKTOR (MODEL *INPUT-OUTPUT*)

Dengan menotasikan a_{ij} sebagai unsur matriks koefisien teknis dan α_{ij} sebagai unsur matriks kebalikan *Leontief* model terbuka maka :

a. Keterkaitan Langsung Ke Depan (KD)

Menunjukkan akibat suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian *output* sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total. Keterkaitan ini dirumuskan sebagai berikut :

$$KD_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

b. Keterkaitan Langsung Ke Belakang (KB)

Menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan *input* antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total. Rumus untuk mencari keterkaitan ini adalah :

$$KBi = \sum_{j=1}^n a_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

c. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung Ke Depan (KDLT)

Menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan *output* dari sektor tersebut secara langsung maupun tidak langsung per unit kenaikan permintaan total. Rumus keterkaitan ini adalah :

$$KDLTi = \sum_{j=1}^n a_{ij} \dots \dots \dots (3)$$

d. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung Ke Belakang (KBLT)

Menyatakan akibat dari suatu sektor yang diteliti terhadap sektor-sektor yang menyediakan *input* antara bagi sektor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung per unit kenaikan permintaan total.

$$KBLTi = \sum_{j=1}^n a_{ij} \dots \dots \dots (4)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ANALISIS KETERKAITAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DENGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

Tinggi atau rendahnya keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian dapat dinilai dari koefisien keterkaitan antar kedua sektor tersebut. Nilai-nilai koefisien keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian dari 14 provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Koefisien Keterkaitan Total Sektor Industri Pengolahan dengan Sektor Pertanian

Provinsi	Keterkaitan Total Sektor Industri Pengolahan dengan Sektor Pertanian	
	Ke Belakang	Ke Depan
Banten	0,12	0,01
Jawa Barat	0,12	0,04
JawaTengah	0,21	0,05
JawaTimur	0,23	0,04
Kalimantan Barat	0,29	0,02
Kalimantan Selatan	0,57	0,06
Lampung	0,71	0,06
Maluku Utara	0,36	0,01
NTT	0,32	0,04
Sulawesi Selatan	0,59	0,15
Sumatera Barat	0,38	0,03
Sumatera Utara	0,47	0,08
Gorontalo	0,27	0,08
DI Yogyakarta	0,40	0,04
Rata-rata	0,36	0,05

Sumber : Hasil Olah I-O Provinsi tahun 2000, 2008

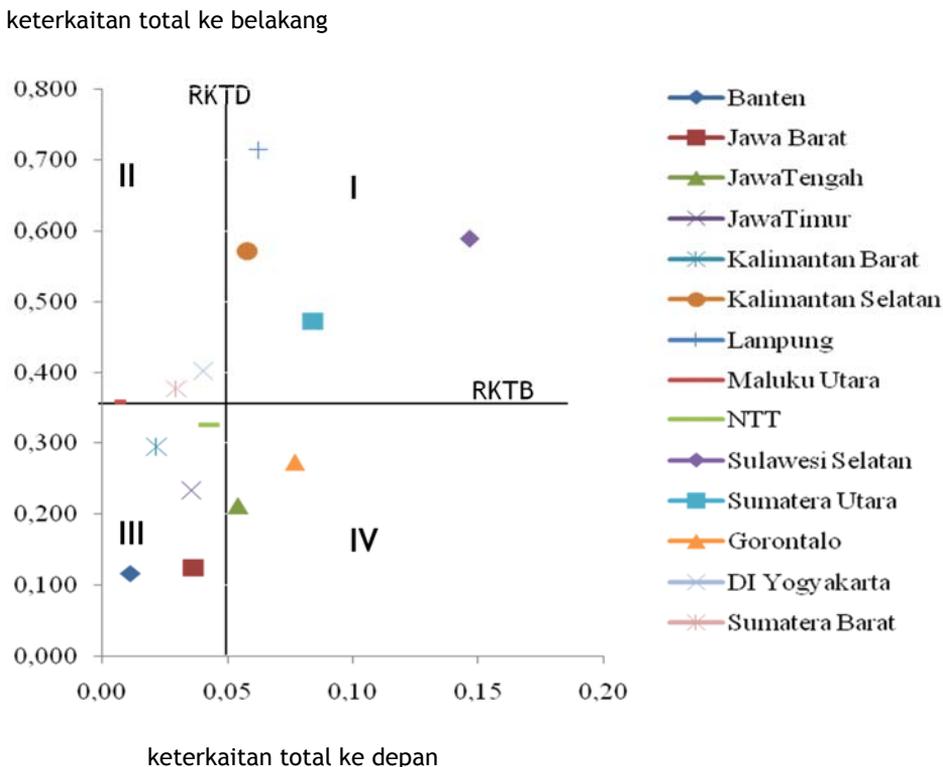
Rata-rata keterkaitan total ke depan dan rata-rata keterkaitan total ke belakang dari 14 provinsi dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. Dalam penelitian ini, keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian pada suatu provinsi dikatakan tinggi apabila nilainya melebihi nilai rata-rata.

Tabel 1 menunjukkan bahwa beberapa provinsi dalam observasi penelitian memiliki keterkaitan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian, baik keterkaitan total ke depan maupun keterkaitan total ke belakang. Dengan demikian, provinsi dalam penelitian dapat diposisikan dalam empat kuadran yang menunjukkan keterkaitan yang dimiliki sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian di provinsi tersebut. Kuadran I merupakan kuadran dimana provinsi

memiliki keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Provinsi yang terletak pada kuadran II memiliki keterkaitan total ke belakang yang tinggi tetapi keterkaitan total ke depannya rendah. Di kuadran III, semua provinsi memiliki keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang yang rendah antar sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Kuadran IV memperlihatkan bahwa setiap provinsi dalam kuadran ini memiliki keterkaitan total ke depan yang tinggi namun

keterkaitan total ke belakangnya rendah. Posisi 14 provinsi dalam masing-masing kuadran dapat dilihat pada Gambar 1.

Setiap sektor dalam perekonomian memberikan kontribusi yang berbeda terhadap PDRB. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran merupakan sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian daerah. Rata-rata kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap PDRB 14 provinsi pada tahun 1997 hingga 2003 dapat dilihat pada Tabel 2.



Keterangan :
 RKT B = garis rata-rata keterkaitan total ke belakang
 RKT D = garis rata-rata keterkaitan total ke depan

Gambar 1. Kuadran Keterkaitan Sektor Industri Pengolahan dengan Sektor Pertanian

Tabel 2. Rata-rata Kontribusi Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran terhadap PDRB Provinsi Tahun 1997-2003 (dalam %)

PROVINSI	Rata-Rata Kontribusi Sektor Tahun 1997-2003 (%)		
	Pertanian	Industri	Perdagangan
Banten*	9,32	52,27	17,48
Jawa Barat	14,34	39,71	18,48
Jawa Tengah	22,38	31,02	21,80
Jawa Timur	19,14	29,25	24,25
Kalimantan Barat	26,61	22,03	20,94
Kalimantan Selatan	24,89	18,23	14,72
Lampung	37,82	13,93	15,80
Maluku Utara*	36,38	15,46	22,75
NTT	43,36	1,75	15,45
Sulawesi Selatan	38,82	12,67	14,29
Sumatera Barat	22,75	13,70	18,32
Sumatera Utara	27,64	26,81	19,89
Gorontalo*	39,17	9,45	13,81
DIY	18,57	15,37	18,74

Keterangan : (*) rata-rata kontribusi sektor hanya dihitung dari tahun 2000-2003

Sumber : diolah dari BPS, 1996-2004

Dalam penelitian ini sektor ekonomi dapat dinyatakan sebagai sektor yang dominan apabila sektor itu mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB selama periode tertentu. Berdasarkan rata-rata kontribusi sektor pada tahun 1997 hingga 2003 (Tabel 2), 14 provinsi dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kategori menurut sektor yang dominan dalam provinsi tersebut. Kategori satu adalah provinsi yang dominan dalam sektor pertanian, yaitu provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Gorontalo. Kategori dua terdiri dari provinsi yang sektor industrinya dominan, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan DIY adalah satu-satunya provinsi dalam penelitian yang masuk dalam kategori tiga, yaitu provinsi dengan sektor perdagangan, hotel, restoran

sebagai sektor dominan dalam perekonomian daerah.

Provinsi dalam kategori satu yang memiliki keterkaitan total ke belakang yang tinggi adalah provinsi Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lampung merupakan provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang tertinggi. Dalam kategori satu, provinsi Maluku Utara, NTT, Kalimantan Barat dan Gorontalo merupakan provinsi dengan keterkaitan ke belakang yang rendah. Provinsi yang memiliki keterkaitan ke belakang terendah yaitu Gorontalo (Tabel 1).

Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Lampung dan Kalimantan Selatan merupakan provinsi dalam kategori satu yang memiliki keterkaitan total ke depan yang tinggi. Keterkaitan total ke depan tertinggi dimiliki Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi Maluku Utara, NTT, Sumatera Barat dan Kalimantan

Barat memiliki keterkaitan total ke depan yang tergolong rendah. Keterkaitan total ke depan terendah terjadi di Maluku Utara.

Terdapat empat provinsi dalam kategori satu yang terletak pada kuadran I yaitu provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan yang tinggi. Provinsi tersebut adalah Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Keterkaitan total ke depan dan ke belakang yang terjadi di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mampu mendukung sektor pertanian melalui *output* yang dihasilkannya. Disamping itu, sektor pertanian juga dapat memberikan dukungan terhadap sektor industri pengolahan dengan menyediakan *input* antara yang cukup untuk proses produksi sektor industri pengolahan.

Sebaliknya dengan empat provinsi yang keterkaitan total ke depan dan ke belakangnya tinggi, provinsi Maluku Utara, NTT dan Kalimantan Barat memiliki keterkaitan total ke depan dan ke belakang yang rendah. Pada Gambar 1 terlihat bahwa provinsi Maluku Utara, NTT dan Kalimantan Barat terletak pada kuadran III. Subsektor yang dominan di tiga provinsi tersebut merupakan subsektor pertanian tanaman dan bahan makanan. Tetapi *output* yang dihasilkannya tidak cukup besar untuk dapat digunakan sebagai *input* yang memadai bagi proses produksi sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan yang ada di provinsi tersebut tidak menghasilkan *output* yang dapat mendukung pertumbuhan *output* pertanian.

Dalam kategori dua, tidak ada satupun provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang yang tinggi.

Provinsi dengan keterkaitan total ke belakang terendah adalah provinsi Banten. Industri pengolahan pada provinsi dalam kategori dua lebih banyak membeli *input* antara yang berasal dari dalam sektor industri itu sendiri. Provinsi dalam kategori dua yang industri pengolahannya paling banyak membeli *input* antara dari sektor industri pengolahan adalah Banten, sedangkan yang pembelianya paling sedikit adalah Jawa Tengah.

Jawa Tengah merupakan satu-satunya provinsi dalam kategori dua yang memiliki keterkaitan total ke depan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian. Sedangkan di tiga provinsi lainnya, yaitu Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat, terjadi keterkaitan total ke depan yang rendah.

Terdapat tiga provinsi dalam kategori dua yang memiliki keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang yang rendah. Ketiga provinsi tersebut yaitu Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Subsektor pertanian yang dominan di semua provinsi dalam kategori dua adalah subsektor pertanian tanaman dan bahan makanan. Tetapi pembelian *output* dari subsektor ini untuk digunakan sebagai *input* antara sektor industri pengolahan relatif kecil dibandingkan pembelian *input* dari subsektor pertanian lain maupun dari sektor industri pengolahan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, hanya ada satu provinsi yang masuk dalam kategori tiga yaitu provinsi DIY. DIY juga satu-satunya provinsi yang berada pada kuadran II seperti yang terlihat pada Gambar 1. Provinsi ini memiliki keterkaitan total ke belakang yang tinggi dan keterkaitan total ke depan yang rendah antar sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

2. ANALISIS KETERKAITAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DENGAN SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, RESTORAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

Nilai-nilai koefisien keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran dari 14 provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterkaitan total ke belakang sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran dari 14 provinsi sebesar 0,112053133. Dalam penelitian ini, keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran dikatakan tinggi apabila koefisien keterkaitannya lebih besar dari nilai rata-rata keterkaitan.

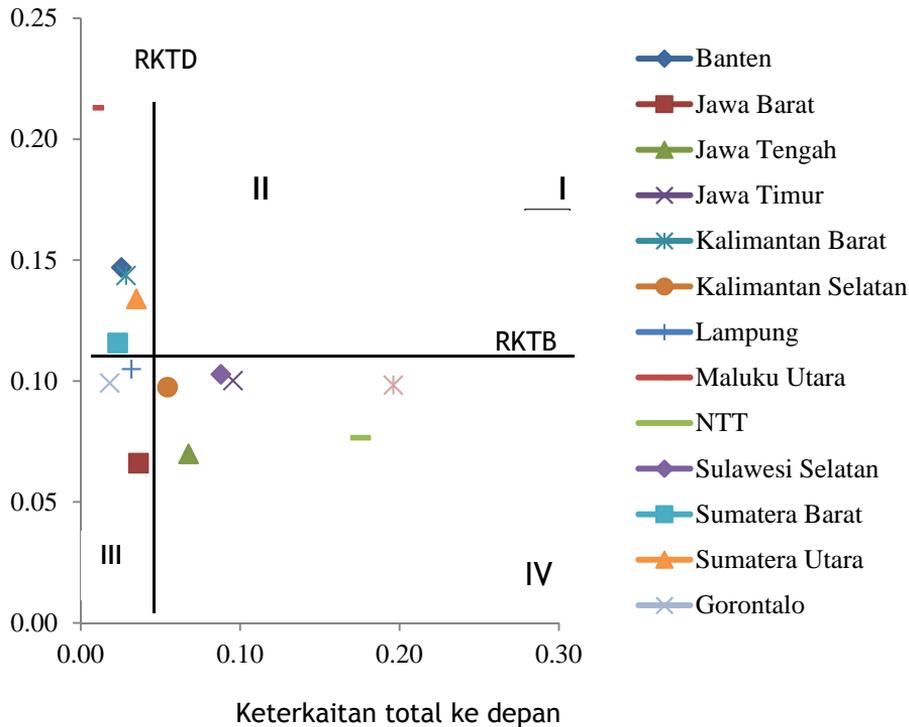
Nilai rata-rata keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran yang terdapat pada Tabel 3 dapat membagi 14 provinsi ke dalam empat kuadran. Posisi masing-masing provinsi dalam suatu

kuadran menunjukkan keterkaitan yang dimiliki provinsi tersebut. Kuadran I merupakan kuadran dimana provinsi yang berada di dalamnya memiliki keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Kuadran II merupakan kuadran dimana provinsi yang berada di dalamnya memiliki keterkaitan total ke belakang yang tinggi tetapi keterkaitan total ke depannya rendah. Pada kuadran III, setiap provinsi memiliki keterkaitan yang rendah antar sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran, baik itu keterkaitan total ke depan maupun ke belakang. Terakhir yaitu kuadran IV, merupakan kuadran dimana provinsi yang berada di dalamnya memiliki keterkaitan total ke depan yang tinggi namun keterkaitan total ke belakangnya rendah. Posisi masing-masing provinsi dalam setiap kuadran dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 3. Koefisien Keterkaitan Total Sektor Industri Pengolahan dengan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran

PROVINSI	Keterkaitan Total Sektor Industri Pengolahan dengan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran	
	Ke Belakang	Ke Depan
Banten	0,15	0,03
Jawa Barat	0,07	0,04
Jawa Tengah	0,07	0,07
Jawa Timur	0,10	0,10
Kalimantan Barat	0,14	0,03
Kalimantan Selatan	0,10	0,05
Lampung	0,10	0,03
Maluku Utara	0,21	0,01
NTT	0,08	0,18
Sulawesi Selatan	0,10	0,09
Sumatera Barat	0,12	0,02
Sumatera Utara	0,13	0,03
Gorontalo	0,10	0,02
DI Yogyakarta	0,10	0,20
Rata-rata	0,11	0,06

Sumber : Hasil Olah I-O Provinsi tahun 2000, 2008



Keterangan :
 RKTDB = garis rata-rata keterkaitan total ke belakang
 RKTDD = garis rata-rata keterkaitan total ke depan

Gambar 2. Kuadran Keterkaitan Sektor Industri Pengolahan dengan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran

Dengan membagi 14 provinsi menjadi tiga kategori berdasarkan sektor yang dominan dalam perekonomian (Tabel 2), analisis keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran dalam penelitian dapat dilakukan menurut kategori masing-masing. Kategori satu adalah provinsi yang dominan dalam sektor pertanian, yaitu provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Gorontalo. Kategori dua terdiri dari provinsi yang sektor industrinya dominan, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan DIY adalah satu-satunya provinsi dalam penelitian yang masuk dalam kategori tiga, yaitu provinsi

dengan sektor perdagangan, hotel, restoran sebagai sektor dominan dalam perekonomian daerah.

Provinsi dalam kategori satu dengan keterkaitan total ke belakang yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran adalah provinsi Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam kategori satu, provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang tertinggi antar sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran adalah Maluku Utara.

Provinsi dalam kategori satu yang memiliki keterkaitan total ke belakang yang rendah antar sektor industri pengolahan

dengan sektor perdagangan, hotel, restoran adalah Lampung, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTT. Keterkaitan total ke belakang terendah antar sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran dalam kategori ini dimiliki oleh NTT. Hanya dua provinsi dalam kategori satu yang memiliki keterkaitan total ke depan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel restoran. Provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan dan NTT.

Dari sembilan provinsi dalam kategori satu, tujuh diantaranya memiliki keterkaitan total ke depan yang rendah antar sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Gorontalo dan Maluku Utara. Provinsi dengan keterkaitan total ke depan terendah antar sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran adalah Maluku Utara. Maluku Utara sekaligus juga menjadi provinsi dalam penelitian yang nilai keterkaitannya tersebut paling rendah.

Tidak ada provinsi dalam kategori satu yang memiliki keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Seperti terlihat pada Gambar 2, dalam kuadran I tidak ada satupun provinsi yang berada di dalamnya. Tetapi ada tiga provinsi dalam kategori satu yang berada pada kuadran III. Provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki keterkaitan yang rendah untuk keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran yaitu provinsi Lampung, Gorontalo dan Kalimantan Selatan.

Banten merupakan satu-satunya provinsi dalam kategori dua yang memiliki keterkaitan total ke belakang yang tinggi antar sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran. Tiga provinsi lain dalam kategori dua, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, memiliki keterkaitan total ke belakang yang rendah antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran.

Provinsi dalam kategori dua terdiri dari empat provinsi dimana dua diantaranya memiliki keterkaitan total ke depan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Provinsi tersebut adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan dua lainnya yaitu Banten dan Jawa Barat memiliki keterkaitan total ke depan yang rendah antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran.

Seperti provinsi dalam kategori satu, dalam kategori dua pun tidak ada provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Jawa Barat adalah provinsi dalam kategori dua yang memiliki keterkaitan total ke depan dan keterkaitan total ke belakang yang rendah antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Provinsi ini merupakan satu-satunya provinsi dalam kategori II yang berada di kuadran III. Provinsi DIY sebagai satu-satunya provinsi dalam kategori tiga memiliki keterkaitan total ke belakang yang rendah dan keterkaitan total ke depan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Posisi provinsi tersebut pada Gambar 2 terlihat berada pada kuadran IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan yang tinggi antar sektor industri pengolahan dan sektor pertanian adalah Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Sedangkan provinsi yang keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depannya rendah yaitu Maluku Utara, NTT, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.
2. Hasil analisis keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor perdagangan, hotel, restoran menunjukkan bahwa tidak ada provinsi dalam penelitian yang memiliki keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan yang tinggi. Provinsi yang memiliki keterkaitan total ke belakang dan keterkaitan total ke depan yang rendah antar sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran adalah Lampung, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

SARAN

1. Keterkaitan sektor industri dengan subsektor pertanian diluar subsektor pertanian tanaman dan bahan makanan di provinsi Maluku Utara, NTT, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten perlu ditingkatkan agar nilai tambah yang dihasilkan agroindustri dapat lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengupayakan pengembangan agroindustri untuk meningkatkan kualitas

dan keamanan produk, meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan para pengelola dan pekerja, melakukan strategi pemasaran dengan cara pengembangan dan diversifikasi produk, meningkatkan promosi, meningkatkan jasa pelayanan dan informasi, dan meningkatkan teknik-teknik baru secara terus menerus.

2. Agar industri dapat mendukung perekonomian di daerah dengan dominasi sektor pertanian, hendaknya pilihan jenis industri yang akan didorong disesuaikan dengan potensi produk yang dihasilkan dari sektor pertanian atau mendukung sektor pertanian. Hal ini khususnya ditujukan untuk provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS dan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta. 2002. *Tabel Input Output DI Yogyakarta Tahun 2000*, Yogyakarta.
- BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2000. *Analisis Tabel Input Output Jawa Barat Tahun 1999, Buku II*, Bandung.
- . 2002. *Tabel Input Output Jawa Barat Tahun 2000*, Bandung.
- BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2002. *Tabel Input Ouput Jawa Timur Tahun 2000*, Surabaya.
- BPS dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 2006*, Surabaya.
- BPS Indonesia. *Statistik Indonesia Tahun 2001-2007*, Jakarta.

- _____. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-2005*, Jakarta.
- BPS Provinsi Banten. 2008. *Banten Dalam Angka 2006/2007*, Banten.
- BPS Provinsi DI Yogyakarta. 2008. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*, DI Yogyakarta.
- BPS Provinsi Gorontalo. 2008. *Gorontalo Dalam Angka 2007*, Gorontalo.
- BPS Provinsi Jawa Barat. 2008. *Jawa Barat Dalam Angka 2007*, Bandung.
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2007. *Jawa Timur Dalam Angka 2005/2006*, Surabaya.
- BPS Provinsi Kalimantan Barat. 2008. *Kalimantan Barat Dalam Angka 2008*, Pontianak.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2008. *Kalimantan Selatan Dalam Angka 2007*, Banjarmasin.
- BPS Provinsi Lampung. 2008. *Lampung Dalam Angka 2007*, Bandar Lampung.
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto 2006*, Ternate.
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2008. *Pendapatan Regional Nusa Tenggara Timur 2004-2006*, Kupang.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2008. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2007*, Makassar.
- BPS Provinsi Sumatera Barat. 2008. *Sumatera Barat Dalam Angka 2007*, Padang.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2007. *Sumatera Utara Dalam Angka 2007*, Medan.
- Hill, H. 2003. *Ekonomi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nainggolan, H.L. *Pertanian Indonesia Dalam Perspektif Industrialisasi dan Perdagangan Bebas, suatu pendekatan teoritis*, Jurnal Ekonomi Rakyat, edisi Juli 2008.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. 2007. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rosa, A. 2006. *Analisis Keterkaitan dan Kinerja Agroindustri Indonesia*, Perpustakaan Bank Indonesia.
- Supriyati dan Ema S. 2006. *Peranan, Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Suryana *et al.* 1998. *Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pertumbuhan Agroindustri Pedesaan*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Todaro, M. dan Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.